



**PUTUSAN**

**Nomor 1361/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4419/PJ/2017, tanggal 15 November 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS**, beralamat di: Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jalan M. H. Thamrin Kavling 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Agustian R. Partawidjaja, jabatan Direktur dan Kosim Sutiono, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put.86252/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa banding ini

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1361/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding sehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar seharusnya dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Cfm. Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp5.875.653.906,00
2	PPh Pasal 15 yang Terutang	Rp 70.540.649,00
3	Kredit Pajak	Rp 70.540.649,00
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp -
5	Sanksi Administrasi	Rp -
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp -

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86252/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00599/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 19 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00018/541/11/092/15, tanggal 11 Desember 2015, atas nama PT Pindo Deli Pulp and Papermills, NPWP 01.001.855.4-092.000, beralamat di: Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jalan M. H. Thamrin Kavling 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak.....	Rp	5.875.653.906,00
Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang.....	Rp	70.540.649,00
Kredit Pajak .....	Rp	70.540.649,00
PPh kurang/(lebih) dibayar .....	Rp	0,00
Sanksi Administrasi .....	Rp	0,00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar .....	Rp	0,00

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1361/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 November 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada 30 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86252/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86252/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00599/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 19 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1361/B/PK/Pjk/2021



Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00018/541/11/092/15, tanggal 11 Desember 2015, atas nama PT Pindo Deli Pulp and Papermills, NPWP 01.001.855.4-092.000, beralamat di: Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jalan M. H. Thamrin Kavling 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00599/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 19 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00018/541/11/092/15 tanggal 11 Desember 2015, atas nama: PT Pindo Deli Pulp and Papermills, NPWP 01.001.855.4-092.000, beralamat di: Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jl. M. H. Thamrin Kav. 22 No. 51, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 5.875.653.906,00
Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang	Rp 70.540.649,00
Kredit Pajak	<u>Rp 70.540.649,00</u>
PPH kurang/(lebih) dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah PPH yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp 0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa PT Wahana Wiratama Line sebagai agen *dependent* dari LKC Shipping Line SDN BHD (Malaysia);

Bahwa LKC Shipping Line SDN BHD (Malaysia) telah memenuhi persyaratan subjektif bahwa perusahaan pelayaran luar negeri tersebut memiliki BUT di Indonesia, dengan demikian tindakan Pemohon Banding yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 15 terkait jasa pelayaran yang dibayarkan kepada LKC Shipping Line SDN BHD (Malaysia) sudah benar;

Bahwa koreksi negatif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2011 sebesar Rp27.334.906,00 tidak dapat dipertahankan; oleh karenanya untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1361/B/PK/Pjk/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H., M.H.

ttd.

Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1361/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



